

MENAKAR STABILITAS HEGEMONI BAGI PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA

Tety Rachmawati

Universitas Potensi Utama Medan

Email: tetyspacerachmawati@gmail.com

Abstract

This paper tried to explain the importance of Hegemonic stability to resolve conflict in Rohingya and also to see ASEAN countries opportunities to be hegemony power, so that they are influential to implementation ASEAN rule particularly in Rohingya conflict resolution. The method that is used in this research is qualitative in descriptive-analytic explanation. Theoretically, hegemony power was needed to create international system stability as well as to create the security in the region. Rohingya conflicts caused many people to evacuate themselves to neighbor countries. This condition caused security in the region became not stable. Therefore, it needed hegemony power to create stability in the region. The country which has strongest power was able to influence other countries. If it was compared to other ASEAN countries, Singapore is the most powerful country in ASEAN. Singapore is one of country that has the biggest military power, advance economic and stable political situation. However, Singapore has weakness as the smallest country with small populations, so that it is not too influential in ASEAN institution. Singapore did not have enough

opportunity to become hegemony power to control instability that was caused of Rohingya conflict.

Keywords: *Hegemonic stability, National Power, Rohingya Conflict Resolution*

Pendahuluan

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar telah menjadi perhatian publik Internasional. PBB menuduh Myanmar melakukan pembersihan etnis Muslim di Rohingya, setelah tentara Myanmar menembaki sedikitnya 30 orang di sejumlah desa yang dihuni Muslim Rohingya di daerah Rakhine dan membakar rumah-rumah mereka (Media Indonesia, 2016). Kasus pelanggaran HAM di Myanmar telah terjadi sejak 1962, dimana Muslim Rohingya dibatasi untuk mendapatkan pendidikan, penggunaan bahasa dan kebebasan beragama (Annual Report UNHCR, 2016).

Etnis Rohingya merupakan populasi muslim terbesar di Myanmar, yang sebagian besar tinggal di Provinsi Rakhine. Muslim Rohingya memiliki ras, agama, budaya dan bahasa yang berbeda dengan masyarakat Burma pada umumnya. Sehingga, pemerintah tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Muslim Rohingya tidak pernah memiliki KTP maupun Paspor Myanmar (Suntoro, 1970). Selain itu, etnis Rohingya juga tidak dimasukkan dalam daftar sensus yang dilakukan pada tahun 2014, yang merupakan sensus penduduk pertama selama 30 tahun terakhir. Pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingnya sebagai imigran dari sub-benua India. Sehingga, konstitusi tidak memasukkan mereka kedalam daftar etnis asli yang harus diakui sebagai warga negara (bbc, 2014).

Menurut Siegfried O. Wolf, konflik di Myanmar ini lebih dilatarbelakangi persoalan ekonomi dibandingkan agama. Muslim Rohingya merupakan penduduk minoritas di Rakhine, Myanmar. Sedangkan, agama budha merupakan penduduk mayoritas. Rakhine merupakan daerah yang

sangat tereksplorasi dan mengalami diskriminasi budaya oleh pemerintah pusat yang didominasi etnis Burma. Sehingga, etnis Rohingya dan Budha Rakhine harus memperebutkan sumber daya yang ada disamping memper-tahankan identitas masing-masing. Hal inilah yang membuat ketegangan semakin tinggi di Rakhine, Myanmar.

Kasus pelanggaran HAM di Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan dan merupakan pelanggaran HAM berat di wilayah Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara dinilai gagal dalam memainkan perannya sebagai organisasi regional. Dalam hal ini, ASEAN tidak mampu menekan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya karena prinsip *non-intervention* yang dianut anggota ASEAN. Penyelesaian konflik di Myanmar dengan bantuan negara-negara ASEAN terganjal oleh prinsip tersebut, sehingga konflik berlangsung berlarut-larut tidak kunjung selesai.

Jika konflik dilihat sebagai konflik agama, karena korban berasal dari agama tertentu, pada kenyataannya Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim tidak dapat berbuat banyak untuk muslim Rohingya. Pada tahun 2015, Indonesia melakukan mediasi dengan Myanmar. Pada pertemuan tersebut hasil kesepakatan hanya membahas masalah pengungsi Rohingya, yang setiap tahun mencari suaka di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Sedangkan, masalah konflik di dalam negeri Myanmar merupakan kewenangan Myanmar sepenuhnya, dan Indonesia tidak berniat terlibat lebih jauh karena Indonesia menghormati sepenuhnya kedaulatan Myanmar. Jika ini merupakan konflik ekonomi, negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Singapura juga tidak dapat menunjukkan perannya dalam kasus Rohingya. Dalam urusan ekonomi, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, berpendapat bahwa ASEAN harus memperkuat integrasi. Namun, dia menegaskan pada krisis kemanusiaan, ASEAN bukan satu negara, sehingga tidak mungkin untuk melakukan intervensi satu sama lain (Inquirer, 2015:1).

Konflik di Rohingya merupakan konflik domestik yang telah mempengaruhi situasi internasional. Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang mencari suaka telah mengganggu stabilitas kawasan, terutama di negara-negara ASEAN lain. Selain itu, kasus pelanggaran HAM pada etnis ini menunjukkan situasi yang tidak kondusif di dalam negeri Myanmar. Konflik domestik yang tidak kunjung selesai ini menyulut kemarahan dunia internasional karena lemahnya peran lembaga negara dalam menyelesaikan konflik sekaligus menegakkan HAM. Selain negara, ASEAN, sebagai institusi internasional juga mendapatkan stigma negatif tentang lemahnya institusi dalam penyelesaian isu domestic negara anggota.

Penelitian ini berusaha menganalisa peluang negara-negara ASEAN menjadi kekuatan hegemoni sebagai upaya penyelesaian konflik Rohingya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian deskriptif analitik, ASEAN membutuhkan kekuatan hegemoni untuk mengontrol situasi internasional. Kekuatan hegemoni ini dapat menciptakan stabilitas bagi sistem internasional. Negara yang memiliki kekuatan besar sehingga dapat memposisikan dirinya sebagai *leader* di ASEAN dapat berpeluang menjadi negara hegemon. Negara ini dapat mengontrol dan memaksa pelaksanaan peraturan di dalam institusi internasional. Bahkan ikut melakukan intervensi bagi terciptanya stabilitas keamanan wilayah.

Peran Penting Kekuatan Hegemoni bagi Stabilitas Internasional

Teori hegemoni merupakan teori dari seorang filosof marxis Antonio Gramsci yang sebelumnya dicetuskan Lenin berupa konsep-konsep dasar dominasi. Gramsci kemudian membedakan antara dominasi dengan hegemoni yang memiliki kepemimpinan moral dan intelektual. Menurut Gramsci kekuatan hegemoni memerlukan penyataan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke dalam sebuah aliansi besar. Kekuatan hegemoni harus

didukung oleh masyarakat, sehingga, masing-masing kekuatan sosial dapat mempertahankan otonominya. Hubungan aliansi dengan masyarakat inilah yang dijadikan sebagai dasar kekuatan hegemoni (Simon, 1999:11). Menurut Gramsci hegemoni adalah suatu keadaan dimana terdapat kekuatan menonjol dan tersupremasi tidak hanya dalam kekuatan fisik, namun juga adanya pengakuan dari pihak lain. Dalam interaksinya di dunia internasional aktor hegemoni akan terlihat lebih menonjol dan akan mendominasi interaksi tersebut. Teori stabilitas hegemoni sendiri digunakan untuk mengukur stabilitas atau instabilitas di dalam politik internasional. Dalam hal ini kekuatan hegemoni memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas. Stabilitas terjadi karena negara hegemoni dapat menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memaksa pihak lain agar mematuhi peraturan dan standar internasional (Hadiwinata, 2002:46). Tanpa adanya hegemoni yang kuat stabilitas internasional tidak mungkin tercipta.

Sistem internasional membutuhkan kekuatan hegemoni untuk memastikan terciptanya stabilitas keamanan. Kekuatan hegemonilah yang akan membentuk peraturan internasional yang kemudian ditaati oleh negara lain. Robert Kohane menyatakan "...adanya dominasi dari suatu negara yang bertindak sebagai hegemon merupakan kondisi yang paling kondusif bagi perkembangan rezim internasional yang mengatur tindakan actor-aktor yang terlibat" (Djelantik, 2015:69). Terdapat hukuman bagi negara yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ancaman dari kekuatan hegemon. Sehingga, setiap peraturan dapat dijalankan secara efektif. Hukuman ini juga dapat diartikan sebagai symbol sebuah kekuatan hegemoni. Dengan hukuman, hegemon dapat menunjukkan posisinya sebagai kekuatan dalam system internasional. Ini merupakan karakter yang menggambarkan besarnya kekuatan dan pengaruhnya dalam mengendalikan system internasional.

Kekuatan hegemoni merupakan sebuah stabilizer dan merupakan kekuatan terbesar dibandingkan negara-negara lain dalam system internasional. Pada dasarnya, negara hegemon memiliki kekuatan yang besar dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Negara hegemon ini memainkan peran sebagai pemimpin (*leader*) dalam system internasional. Kekuatan hegemoni didorong untuk menyediakan alat publik. Alat publik yang berupa nilai yang dapat dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitar, atau berupa kondisi aman dan stabil di dalam system internasional. Tanpa kekuatan hegemoni, system internasional menjadi tidak stabil dikarenakan tidak ada penyedia alat publik yang dapat mengendalikan sistem internasional.

Di dalam sistem internasional, institusi internasional tidak akan efektif tanpa adanya kekuatan hegemoni (Yazid, 2015:69). Kekuatan hegemonilah yang memiliki cukup sumber daya untuk menekan institusi internasional. Sehingga, peraturan yang ditetapkan dalam institusi internasional dapat diterapkan oleh negara anggota secara efektif.

ASEAN didirikan atas dasar keinginan negara-negara Asia Tenggara untuk memperbaiki hubungan dan menghindari terjadinya konflik. ASEAN tidak diinisiasi oleh satu negara dengan kekuatan paling besar di antara negara-negara lainnya. Sehingga, kekuatan besar tersebut dapat mendominasi Negara lainnya. Seperti Amerika yang dengan kekuatan besarnya mendominasi perjanjian *North America Free Trade Agreement* (NAFTA).

Sebuah kelemahan institusi internasional ketika membiarkan kasus pelanggaran HAM terjadi dan tidak kunjung terselesaikan. ASEAN tidak tegas menanggapi masalah status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak diakui pemerintah Myanmar (Republika, 2015). Pada tanggal 15 Desember 2008, semua anggota meratifikasi Piagam ASEAN dan berkomitmen untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia. Namun, pada kenyataannya ASEAN tidak dapat banyak bertindak ketika terjadi pelanggaran HAM di Myanmar. Usaha

yang dilakukan AICHR (*Asia Intergovernmental Commission on Human Right*) juga terlihat tidak begitu signifikan dalam menyelesaikan kasus Rohingya. AICHR lebih berperan sebagai lembaga negosiasi politik dibandingkan lembaga perlindungan HAM (Kompas, 2012). Di samping itu, ASEAN tidak memiliki legitimasi untuk menerapkan sanksi bagi pelanggaran HAM di Myanmar. Oleh karena itu, dunia menyorot kredibilitas ASEAN sebagai satu-satunya organisasi kawasan di Asia Tenggara.

Sebagai institusi regional, usaha ASEAN terkendala oleh prinsip *non-intervensi*. Beberapa pihak menilai, prinsip inilah yang menyebabkan permasalahan Rohingya menjadi rumit. Prinsip ini menghalangi ASEAN turut andil dalam menyelesaikan konflik di Myanmar. Prinsip *non-intervensi* menjunjung kedaulatan penuh bagi Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan dalam negerinya sendiri. Namun, konflik yang tidak kunjung selesai, memperlihatkan bahwa pemerintah Myanmar tidak memiliki kemampuan menyelesaikan konflik Rohingya. Aung San Suu Kyi seorang tokoh politik penerima Nobel Perdamaian juga terlihat pasif menghadapi konflik yang berlangsung di dalam negerinya itu.

Akibat konflik, banyak warga Rohingya yang mengungsi dan keluar dari Myanmar. Para pengungsi ini ingin mencari perlindungan di negara lain. Namun, mereka menghadapi masalah baru. Para pengungsi ini kesulitan mendapatkan suaka ataupun perlindungan politik di negara tujuan. Gelombang pengungsi yang cukup besar mengganggu stabilitas keamanan negara-negara ASEAN lainnya.

Menurut teori stabilitas hegemoni, stabilitas keamanan ASEAN dapat dikontrol oleh kekuatan hegemoni. Absennya kekuatan hegemoni di ASEAN dapat mengganggu kestabilan keamanan wilayah ASEAN. Karena tidak ada kekuatan penyeimbang yang mampu berperan sebagai stabilizer. Hal inilah yang menjadi masalah bagi penyelesaian kasus Rohingya, dimana absennya

kekuatan hegemoni menjadi alasan konflik tidak kunjung selesai sehingga mengganggu kestabilan keamanan negara-negara ASEAN.

Pelanggaran HAM Di Rohingya

Populasi muslim Rohingya mencapai 13% atau sekitar 7 juta jiwa (Bustamam, 2013:317). Jumlah ini lebih banyak dari yang disebutkan pemerintah Myanmar yakni hanya 3%. Wilayah Arakan yang dihuni muslim Rohingya pernah menjadi negara merdeka sampai tahun 1784. Menurut Mohammed Yunus, Presiden *Rohingya Solidarity Organisation* (RSO), kata Arakan berasal dari bahasa Arab yakni bentuk jamak dari *rukun* artinya pilar atau tiang yang menggambarkan prinsip Lima Rukun Islam. Kata Rohingya sendiri berasal dari kata *Rohai* atau *Roshangee* yang kemudian mengalami peleburan kata menjadi Rohingya, sebutan bagi warga muslim Arakan. Dari pengertian tersebut, dapat diprediksi bahwa etnis Rohingya telah mewarisi agama Islam turun temurun.

Usaha untuk menghilangkan warga Rohingya dimulai setelah kemerdekaan Myanmar. Pada tahun 1948, *Union Citizenship Act* mendefinisikan rakyat Myanmar dan mengidentifikasikan spesifik etnis yang diperbolehkan mendapatkan kewarganegaraan. Namun, *Union Citizenship Act* tidak memasukkan etnis Rohingya kedalam daftar warga Negara Myanmar (Lowenstein, 2015:5).

Konflik di Rakhine beberapa kali menunjukkan eskalasi. Konflik ini sudah ada sejak tahun 1978, saat militer Myanmar melakukan operasi *Naga Min* (Raja Naga). Militer mengambil tindakan bagi imigran ilegal, targetnya masyarakat Rohingya di Rakhine. Tentara militer menyiksa, memperkosa, dan membunuh banyak warga Rohingya (Lowenstein, 2015:8). Pada tahun 2001, segerombolan orang menyerang kurang lebih 28 masjid dan sekolah Islam, dalam penyerangan ini, pihak keamanan tidak mengambil tindakan

tetapi justru ikut andil dalam penyerangan. Selain itu, *Human Right Watch* melaporkan pada tahun 2002, pemerintah Myanmar memerintahkan militer untuk merobohkan masjid yang berdiri tidak sah dan menutup sekolah Islam, kemudian menjadikannya kantor administratif pemerintah (Lowenstein, 2015:11). Pada pertengahan tahun 2012, muslim Rohingya terlibat konflik dengan masyarakat Budha, dinegara bagian Rakhine. Kerusakan ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, ratusan luka-luka, dan beberapa rumah dan masjid rusak bahkan terbakar. Konflik kembali menunjukkan eskalasi pada tahun 2016, ratusan rumah etnis Rohingya dibakar, dan puluhan warga ditembaki oleh tentara Myanmar (BBC, 2016).

Setiap tahunnya terdapat sejumlah pengungsi yang meninggalkan Myanmar menuju negara-negara tetangga khususnya Bangladesh. UNHCR melaporkan bahwa jumlah pengungsi Rohingya yang mencari suaka ke Bangladesh pada tahun 1978-1980 mencapai 200.000 orang dan tahun 1991-1992 sekitar 250.000 . Selama tahun 2008 sampai 2009, lebih dari 6.000 warga Rohingya telah melakukan pelayaran ke Malaysia dan Thailand. Namun, di tahun 2010, Thailand meminta kapal yang membawa pengungsi Rohingya kembali ke Laut, akibatnya ratusan orang meninggal dunia. Gelombang pengungsi dalam jumlah besar kembali terjadi pada tahun 2012, saat itu dilaporkan 400 orang meninggal dalam pelayarannya ke negara-negara tetangga, dan 140.000 berhasil sampai kamp-kamp penampungan. Pada 15 Mei 2015, PBB melaporkan ada sekitar 3.000 orang pengungsi telah diselamatkan setelah terdampar di pantai Indonesia, Malaysia, dan Thailand, sedangkan ribuan lainnya masih terkatung-katung di tengah laut (Muhamad, 2015:6). Arus pergerakan pengungsi dengan jumlah yang besar, selain karena masalah keamanan, para pengungsi Rohingya juga telah ditempatkan sebagai *stateless person*, sehingga gelombang pengungsi begitu banyak dari tahun ke tahun. Kondisi ini mempengaruhi dinamika politik dan keamanan internasional.

Negara-negara tujuan pengungsi seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia membatasi jumlah pengungsi yang masuk ke negaranya.

Menakar Kekuatan Hegemoni ASEAN

Sebuah negara akan menjadi negara hegemon ketika memiliki kekuatan dan kestabilan militer, ekonomi, politik, institusional, dan ideologi (Yazid, 2015:71). Kelima aspek tersebut diperlukan untuk menjadi kekuatan besar dalam mengendalikan system internasional. Singapura adalah Negara yang memiliki kekuatan ekonomi paling besar dibandingkan Negara ASEAN lainnya, sedangkan Indonesia merupakan Negara dengan populasi terbesar di ASEAN bahkan menjadi nomor empat di dunia. Kekuatan hegemoni tidak hanya membutuhkan dua aspek tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan kedua Negara ini atau bahkan Negara ASEAN lain memiliki kelima aspek di atas, sehingga berpeluang menjadi kekuatan hegemoni di ASEAN.

1. Militer

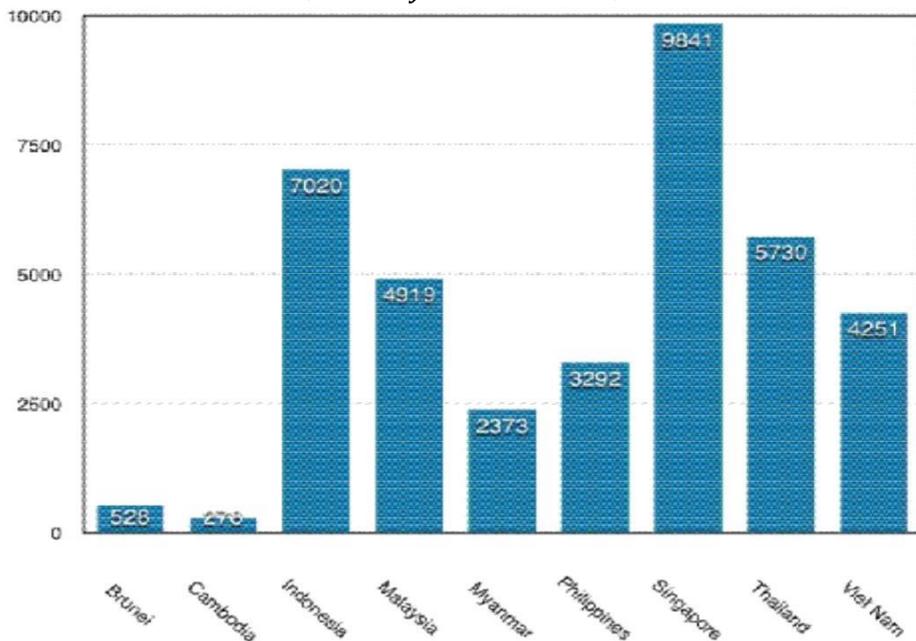
Kekuatan militer merupakan salah satu aspek kekuatan nasional sebuah Negara. Negara hegemoni harus memiliki militer yang paling kuat diantara negara-negara lainnya. Kekuatan militer dibutuhkan untuk mengendalikan negara baik mempertahankan maupun menyerang demi stabilitas keamanan wilayah. Kekuatan hegemoni dengan militer dan persenjataan yang tangguh, mampu menunjukkan *prestige* politik pada dunia internasional (Morgenthau, 1990:105). *Prestige* ini tidak hanya sekedar *prestige* biasa namun juga merupakan sebuah *previlage* yang memberikan ruang untuk mengontrol system internasional.

Dari data *Global Fire Power* skor untuk *Nation Power Index* terbesar berturut-turut dimiliki oleh Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja dan Laos (Global Fire Power, 2016:1).

Data ini berdasarkan jumlah dan keanekaragaman jenis senjata yang dimiliki masing-masing negara, faktor geografis, fleksibilitas logistik, dan sumber daya alam serta ketersediaan tenaga kerja. Data tersebut memungkinkan Negara dengan jumlah penduduk yang besar menempati posisi tertinggi.

Menurut *Global Fire Power* Indonesia menempati posisi tertinggi dan menjadi kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Namun, pengamat militer dari *Digimed Karya Imaji*, Anton Aliabbas menjelaskan bahwa kekuatan militer Indonesia cukup besar secara kuantitas. Sebagai negara dengan wilayah yang besar, Indonesia memiliki jumlah alusista dan tentara yang cukup banyak dan terbesar se-Asia Tenggara. Namun, jika dilihat dari jumlah belanja militer, Singapura memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Berikut diagram belanja militer negara-negara di ASEAN.

Belanja Militer Negara-Negara ASEAN Tahun 2014
(dalam Juta US dollar)



Sumber: SIPRI dataset dalam www.cogitasia.com

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa Singapura memiliki jumlah belanja militer terbesar diikuti oleh Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Myanmar, Brunei, dan Kamboja. Anggaran belanja militer yang besar digunakan oleh Singapura untuk membeli alusista berkualitas yang diimpor dari Amerika, Israel dan Kuwait.

Walaupun menurut *Global Fire Power* kekuatan militer Indonesia terbesar di ASEAN, namun, Indonesia tidak memiliki aliansi militer sebagaimana dimiliki Singapura dan Malaysia. Pada tahun 1971 Singapura dan Malaysia, bersama dengan Inggris, Australia, dan New Zealand membentuk sebuah aliansi militer bernama FPDA (*Five Power Defense Arrangement*). FPDA ini merupakan perjanjian multilateral yang secara militer dapat menguntungkan Singapura dan Malaysia. Jika kedua negara ini diserang maka negara lain seperti Australia, Inggris, dan New Zealand berkewajiban untuk memberikan bantuan.

Singapura juga memiliki perjanjian kerjasama militer dengan Amerika melalui *US-Singapore Strategic Framework Agreement* (USSFA). Hal ini dapat dilihat dari adanya Komando Pasifik Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Laut Changi (Singapura), serta fasilitas pesawat udara Amerika yang mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar (Singapura) (Ali, 2010:1). Selain itu, Singapura dan Amerika beberapa kali melakukan latihan militer bersama di Laut China Selatan. Aliansi militer Singapura dan Amerika dapat dikatakan sangat dekat.

2. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penting untuk mendukung kekuatan nasional sebuah Negara. Dengan kekuatan ekonomi, negara memiliki kemampuan untuk menyediakan modal bagi berbagai kebutuhan. Baik berupa kebutuhan untuk memenuhi *hard power* maupun *soft power*. Perkembangan ekonomi tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Negara hegemoni harus memiliki teknologi yang maju untuk mendukung perkembangan ekonomi. Beberapa negara ASEAN yang memiliki teknologi

yang maju seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia khususnya dalam bidang teknologi informasi.

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa factor seperti GDP per kapita. Namun, menurut Kohane, hanya menghitung GDP per kapita bagi kekuatan sebuah hegemoni dirasa belum cukup. Dalam hal ini tingkat daya saing ekonomi lebih bisa menggambarkan kekuatan ekonomi sebuah negara. Namun, mengukur GDP per kapita juga menjadi salah satu usaha untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat di sebuah Negara. Berikut data untuk melihat GDP per kapita di masing-masing negara ASEAN.

Tabel 1: GDP Per Kapita Negara-negara ASEAN

Country	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Brunei Darussalam	31,452	33,191	38,021	28,454	32,063	42,431	42,445	39,879
Cambodia	515	801	827	735	785	882	950	1,037
Indonesia	1,636	1,910	2,244	2,359	2,988	3,498	3,563	3,460
Lao PDR	576	719	882	913	1,079	1,262	1,443	1,548
Malaysia	6,160	7,166	8,393	7,216	8,515	9,962	10,346	10,420
Myanmar ⁸	233	333	438	538	706	853	885	858
Philippines	1,408	1,717	1,917	1,829	2,127	2,338	2,568	2,707
Singapore	33,580	39,224	39,724	38,577	43,570	52,865	54,007	55,182
Thailand	3,162	3,743	4,106	3,947	4,743	5,116	5,391	5,679
Viet Nam	798	918	1,165	1,232	1,338	1,543	1,755	1,909
ASEAN ⁹	1,955	2,309	2,647	2,610	3,162	3,619	3,751	3,832

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2014, www.asean.org

Dari data tersebut, terlihat bahwa Singapura merupakan Negara dengan GDP per kapita terbesar di ASEAN. Bahkan angkanya terus naik dan mengungguli negara-negara maju lain seperti Brunei dan Malaysia. Selisih angka antara Brunei dan Singapura pun cukup signifikan, sekitar 15.503

US dollar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Myanmar, GDP per kapita Singapura hampir mencapai 55 kali lipat dari Myanmar. Dalam hal ini, kekuatan ekonomi Singapura cukup besar dan mampu mengungguli Negara-neagra ASEAN lainnya.

Selain GDP kekuatan ekonomi juga dapat dilihat dari daya saing ekonomi sebuah negara. Daya saing ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk melihat produktifitas ekonomi negara. Michael Porter menjelaskan tingkat produktifitas negara dapat ditentukan dari 12 pilar ekonomi, yaitu institusi, infrastruktur, lingkungan ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan, pendidikan tinggi dan pelatihan, pasar barang yang efisien, pasar tenaga kerja yang efisien, pasar uang yang berkembang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, bisnis yang memuaskan dan inovasi (Porter, 1990). Negara yang kompetitif akan membuat produktivitas meningkat, hal ini akan mendorong kenaikan upah sehingga dapat memajukan pembangunan. Berikut data ranking daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN mengacu pada indeks daya saing global.

Tabel 2: Tingkat Daya Saing Negara-negara ASEAN Tahun 2014-2015

No	Negara	Ranking Dunia
1	Singapura	2
2	Malaysia	20
3	Thailand	31
4	Indonesia	34
5	Filipina	52
6	Vietnam	68
7	Laos	93
8	Kamboja	95
9	Myanmar	134
10	Brunei	n/a

Sumber: World Economic Forum 2015, www.weforum.org

Singapura menempati urutan teratas dan menduduki peringkat dua di dunia untuk daya saing ekonomi. Diikuti oleh Malaysia, Thailand dan Indonesia. Singapura telah memperlihatkan kinerja ekonomi yang baik dengan menjadi kekuatan besar dalam hal daya saing ekonomi, setelah Swiss. Data di atas memperlihatkan selisih peringkat yang cukup besar antara Singapura dan negara-negara lain di ASEAN. Selain Singapura, Malaysia juga memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Sedangkan Thailand dan Indonesia tidak terlalu memperlihatkan perkembangan ekonomi yang signifikan.

3. Politik

Kekuatan politik memiliki pengaruh besar bagi kekuatan hegemoni. Negara hegemoni harus memiliki kekuatan politik untuk menanamkan pengaruh atas negara lainnya. Kekuatan politik suatu negara dapat dilihat dari hubungannya dengan negara-negara lain, terlebih hubungannya dengan negara-negara besar. Di ASEAN, antar negara cenderung tidak memiliki konflik yang besar. Di tahun 1963, Indonesia pernah terlibat konflik dengan Malaysia. Pada saat itu, Inggris memiliki keinginan untuk menggabungkan koloninya di Kalimantan, keinginan ini mendapat dukungan Malaysia. Kasus ini membuat presiden Soekarno menyerukan isu ganyang Malaysia. Namun, hubungan kedua negara ini kembali membaik setelah konferensi di Bangkok 1966. Sebelas tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1977, Kamboja terlibat perang dengan Vietnam dan berdamai setelah 14 tahun hubungan mereka memanas. Selain kedua kasus tersebut, antar Negara ASEAN tidak pernah terlibat konflik besar.

Selain hubungan baik antar sesama anggota ASEAN, hubungan baik juga ditunjukkan kepada Negara-negara yang memiliki pengaruh besar di dunia. Seperti hubungan baik antara Thailand dan Filipina dengan Amerika. Thailand dan Filipina merupakan sekutu militer resmi Amerika sejak perang

dingin. Namun, hubungan Thailand dan Amerika sempat memanas akibat kudeta militer Thailand pada Mei 2014. Akibat kudeta tersebut, Amerika menghentikan bantuan keamanan dan pertahanan untuk Thailand. Selain Thailand, Filipina juga sempat memiliki hubungan yang tidak baik dengan Amerika. Filipina telah menjadi sekutu militer dan bekas negara jajahan Amerika. Namun, ketika Rodrigo Duterte menjadi Presiden Filipina, ia menyatakan pemutusan hubungan sekutu dengan Amerika. Sehingga hubungan kedua negara ini tidak lagi sebagai aliansi yang sering bekerjasama.

4. **Institusional**

Kekuatan militer, ekonomi dan politik dapat menentukan posisi sebuah negara di dalam institusi internasional. Negara hegemoni memiliki kekuatan untuk mengontrol institusi internasional. Negara hegemoni ini dapat menanamkan pengaruhnya pada negara anggota lain di dalam institusi. Aturan dan hukum yang disepakati bersama oleh anggota dapat diterapkan dengan efektif bersama dengan penagwasan negara hegemoni. Negara hegemoni dapat memberlakukan sanksi bagi anggota yang melanggar aturan atau hukum yang telah disepakati bersama.

Negara-negara yang memiliki kekuatan nasional lebih besar seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, cukup memiliki peran dalam menginisiasi berbagai kerjasama di ASEAN. Seperti Singapura yang telah menginisiasi perjanjian *open sky* pada ASEAN Summit 2002 dan berperan aktif dalam mempengaruhi hasil dari kesepakatan perjanjian tersebut. Indonesia juga pernah menjadi inisiator sekaligus mediator konflik antara *Moro National Front Liberation* dan pemerintah Filipina dalam konflik di Filipina Selatan. Indonesia memegang peran penting sampai akhirnya disepakati perjanjian damai di Manila pada tahun 1996.

5. Ideologi

Perang Dingin memunculkan dua ideology besar dunia, yaitu antara liberal-demokratis dan Komunis. Vietnam terkenal dengan Ho Chi Min sebagai tokoh komunis. Selain Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar merupakan negara yang cenderung ke arah komunis. Sedangkan Indonesia, Filipina, dan Malaiysia lebih cenderung demokratis. Brunei menunjukkan keberpihakan yang berbeda. Dalam peraturan pemerintahannya, Brunei memberlakukan sistem syari'at Islam dengan tidak sepenuhnya meninggalkan hukum sekuler warisan Inggris. Berbeda dengan Singapura dan Thailand, kedua negara ini memiliki kecenderungan terhadap ideology liberal-demokratis. Namun, Singapura menggunakan sistem pemerintahan otoriter yang anti kritik, sedangkan pemerintahan Thailand didominasi militer, yang sejatinya system kedua Negara tersebut jauh dari kesan negara demokratis liberal.

Absennya Kekuatan Hegemoni ASEAN

Kekuatan sebuah negara yang mencakup lima aspek di atas dapat mendorong negara tersebut untuk menjadi kekuatan hegemoni. Kekuatan hegemoni ini yang akan menjamin stabilitas keamanan wilayah ASEAN. Dengan dominasi dan pengaruhnya, kekuatan hegemoni mampu menekan penyelesaian konflik Rohingya. Berdasarkan pembahasan kelima aspek kekuatan hegemoni di atas, sepuluh negara ASEAN yang berpeluang besar menjadi Negara hegemoni adalah Singapura. Namun, dalam hal ini tulisan Yazid tidak memasukkan luas wilayah dan jumlah penduduk ke dalam kriteria Negara hegemon. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan kekuatan nasional yang dapat menjadi alat sebuah Negara menamkan pengaruhnya. Dari penjelasan di atas, Singapura menjadi negara yang berpeluang menjadi negara hegemon. Dengan kualitas persenjataan dan militer yang mumpuni, ekonomi yang kuat, dan politik yang stabil,

Singapura tampak menjadi dominasi bagi Negara yang lain. Namun, secara ideology, Singapura tidak menerapkan ideology liberal-demokrasi seperti negara hegemoni lain, Inggris dan Amerika. Selain itu, Singapura dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta dan luas wilayah 719 km tampak kurang kuat jika berhadapan dengan Indonesia yang memiliki sekitar 240 juta penduduk dengan luas wilayah 1,9 juta km.

Konflik yang terjadi di Rohingya telah menyebabkan ketidakstabilan keamanan internasional akibat gelombang besar pengungsi. Negara-negara ASEAN juga tidak semuanya mau menerima pengungsi dalam jumlah besar tersebut. Alasan keamanan dan anggaran menjadi pertimbangan penerimaan para pengungsi. Seperti Malaysia yang menolak pengungsi Rohingya karena alasan keamanan. Menurut Oh Ei Sun, dari *Rajaratnam School of International Studies*, tidak seperti pengungsi Bosnia yang diterima oleh Malaysia, pengungsi Rohingya jumlahnya terlalu banyak dan kondisi geografis Malaysia dan Myanmar yang dekat ditakutkan dapat menimbulkan konflik baru (Tempo, 2015).

Selain itu, Myanmar telah melakukan pelanggaran hukum internasional yakni diskriminasi rasial terhadap etnis Rohingya, tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga Negara, dan kejahatan kemanusiaan. Para pengungsi ini juga menjadi korban perdagangan manusia. Banyak dari mereka yang dibunuh dengan ditembak atau dilempar dari perahu dan dibiarkan tenggelam (Amnesty International, 2015). Alasan pembunuhan ini karena pihak keluarga gagal membayar uang tebusan. Beberapa hal tersebut sudah cukup menjadi alasan negara-negara ASEAN mengambil tindakan. Namun, sejauh ini penyelesaian konflik Rohingya baru sebatas mediasi. Negara-negara ASEAN enggan terlibat lebih jauh dalam permasalahan tersebut.

Tidak ada negara di ASEAN yang memiliki pengaruh cukup besar sehingga bisa menekan pemerintahan Myanmar untuk mengambil tindakan,

atau bahkan melakukan intervensi di dalam negeri Myanmar. Jika dilihat dari pengaruh dalam institusi internasional, tidak ada negara yang memiliki pengaruh paling besar diantara yang lainnya. Masing-masing negara memiliki kekuatan yang sama di ASEAN.

Kesimpulan

ASEAN tidak memiliki negara hegemon untuk menjaga kestabilan wilayah. Oleh karena itu, konflik di Rohingya tidak kunjung terselesaikan. Dengan adanya negara hegemoni stabilitas keamanan internasional dapat diciptakan dengan memaksa penerapan peraturan dan standar internasional.

Konflik di Rohingya telah menyebabkan gelombang besar pengungsi. Hal ini mengganggu stabilitas keamanan ASEAN dan menjadi sorotan dunia internasional. Beberapa negara ASEAN melakukan penolakan atas kedatangan para pengungsi. Keamanan dan faktor anggaran menjadi alasan negara-negara menolak kedatangan pengungsi tersebut. Myanmar telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional seperti diskriminasi rasial terhadap etnis Rohingya, tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga Negara, dan kejahatan kemanusiaan. Beberapa permasalahan tersebut sudah cukup mendorong pihak eksternal mengambil tindakan untuk resolusi konflik di Rohingya. Namun, sejauh ini tindakan yang diambil masih dalam tahap mediasi. ASEAN belum memiliki kekuatan hegemoni yang dapat melakukan intervensi di domestik Myanmar.

Saran

Kasus pelanggaran HAM di Rohingya harus segera diselesaikan. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sudut pandang. Kedepannya, diharapkan penelitian lebih cenderung aplikatif sehingga proses penyelesaian konflik lebih implementatif.

Daftar Referensi

Buku:

Djelantik, Sukawarsini. *Asia Pasifik: Konflik, Kerjasama, dan Relasi dan Antar Kawasan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.

Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius. 2002.

Morgenthau, Hans J. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 1990.

Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Insists dan Pustaka Pelajar. 1999.

Jurnal:

Bustamam, Ridwan. *Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan*. Jurnal Lektur Keagamaan. Vol. 11, No. 2. 2013.

Muhamad, Simela Victor. *Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia dan ASEAN*. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. VII, No. 10. Mei 2015.

Internet:

Abuza, Zachary. *Analyzing Southeast Asia's Military Expenditures*. May 7, 2015. Diakses pada 30 Januari 2017; diunduh dari <https://www.cogitasia.com/analyzing-southeast-asias-military-expenditures/> Ali,

Helvas Alman. *Analisis Terhadap Kebijakan Pertahanan Singapura*. Diakses pada 30 Januari 2017; diunduh dari <http://www.fkpmaritim.org/analisis-terhadap-kebijakan-pertahanan-singapura/>

_____. *Alasan Malaysia Ogah Bantu Pengungsi Rohingya*. Diakses pada 7 Februari 2016; diunduh dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/18/118666972/alasan-malaysia-ogah-bantu-pengungsi-rohingya>.

Amnesty International. *Asia Tenggara: Para Pengungsi Rohingya Yang Dipersekusi Dari Myanmar Menderita Kekerasan Yang Mengerikan*

- Di Laut*. 2015. Diakses pada 7 Februari 2017; diunduh dari <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2127132015/INDONESIAN.pdf>.
- Annual Report UNHCR. *Situation of human rights of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar*. 2 Juni 2016. Diakses pada 30 Desember 2016; diakses dari <http://www.globalr2p.org/media/files/hchr-report-rohingya.pdf>.
- _____. *Dunia Dituntut Perhatikan Rohingya*. Diakses pada 7 Februari 2017; diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/15/05/22/noqm0h26-dunia-dituntut-perhatikan-rohingya>Lee, Jones. *ASEAN and the Norm of Non-interference in Southeast Asia: A Quest for Social Order*. Oxford: Nuffield Collage. 2009.
- Jones, Mark. *Whice ASEAN Country Is The Most Competitive?*. 2015. Diakses pada 1 Februari 2017; diunduh dari <https://www.weforum.org/agenda/2015/04/which-asean-country-is-the-most-competitive/>.
- _____. *Militer Myanmar Bakar 1.500 Rumah Warga Rohingya*. 2016. Diakses pada 9 Januari 2017; diunduh dari <http://mediaindonesia.com/news/read/82525/militer-myanmar-bakar-1-500-rumah-warga-rohingya-1/2016-12-14>.
- Lowenstein, Allard K. *Persecution of The Rohingya Muslims: Is Genocide Occuring in Myanmar's Rakhine State?*. Diakses pada 9 Januari 2017; diunduh dari http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf.
- _____. *PBB: Myanmar Berusaha lakukan Pembersihan Etnis Muslim Rohingya*. Diakses pada 30 Desember 2016; diunduh dari <http://www.voa-islam.com/read/world-news/2016/11/25/47519/pbb-myanmar-berusaha-lakukan-pembersihan-etnis-muslim-rohingya/#sthash.Pb0hZdPN.dpbs>.

- _____. *PKPU-ACT: Etnis Rohingya tak Diakui Sebagai Warga Myanmar*. 21 November 2016. Diakses pada 30 Desember 2016; diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/11/21/ogzgtf313-pkpuact-etnis-rohingya-tak-diakui-sebagai-warga-myanmar>.
- _____. *Rohingya Rentan Radikalisasi*. 2012. Diakses pada 9 Januari 2017; diunduh dari <http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/30/07543018/rohingya.rentan.radikalisasi>.
- Security Council. *The Situation of Rohingya in Myanmar*. Diakses pada 30 Januari 2017; diunduh dari http://www.munlaws.com/uploads/1/9/7/7/19771651/sc_rohingya_in_myanmar_2016.pdf.
- _____. *Southeast Asian Countries Ranked by Military Power (2016)*, diakses pada 30 Januari 2017; diunduh dari <http://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.asp>.
- Suntoro, Agus. *Genosida Etnis Rohingya*. Diakses pada 6 Februari 2016; diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/11/22/oh14o62-genosida-etnis-rohingya>.
- _____. *Why is there communal violence in Myanmar?*. 3 July 2014. Diakses pada 9 Januari 2017; diunduh dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788>.

